

## **SISTEM KOORDINASI ANTAR SKPD DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM APLIKASI BERBASIS SMARTPHONE JOGJA ISTIMEWA**

### **COORDINATION SYSTEM BETWEEN SKPD IN THE IMPLEMENTATION OF JOGJA ISTIMEWA SMARTPHONE BASED APPLICATION PROGRAMS**

Oleh: Dhimas Deworo Puruhito dan Dra. F. Winarni, M.Si., Fakultas Ilmu Sosial

[dhimasdeworo@gmail.com](mailto:dhimasdeworo@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan: (1) wawancara, (2) observasi, (3) dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen, maka melakukan validasi dengan cara memahami metode penelitian yang akan menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model penelitian interaktif Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi di Dinas Komunikasi dan Informatika berjenis koordinasi internal vertikal dan eksternal horisontal. Koordinasi internal vertikal dilakukan oleh atasan dan bawahan pada lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika. Koordinasi eksternal horisontal dilakukan antar instansi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Mekanisme pencapaian koordinasi yang efektif terdapat pada tingkat hierarki, aturan prosedur dan penciptaan tugastugas yang berdiri sendiri. Mekanisme koordinasi yang berjalan kurang baik terdapat pada sistem informasi vertikal dan hubungan horisontal yaitu kontak langsung. Hambatan yang dialami dalam koordinasi adalah kurangnya kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas, kurangnya kontak langsung pegawai antar instansi dan tidak adanya tim khusus

**Kata Kunci: koordinasi, Aplikasi Jogja Istimewa**

#### **Abstract**

*This study aims to show the coordination carried out by the Office of Communication and Information with the Office of Tourism and the Office of Culture in the implementation of Jogja Istimewa smartphone based application programs. The design of this research is descriptive qualitative. Data collection techniques in this thesis use: (1) interviews, (2) observations, (3) documentation. Researchers as an instrument, then the researcher do the validation by understanding the research methods that will use source triangulation. Data analysis techniques using an interactive research model by Miles and Huberman. The results showed that the coordination in the Communication and Informatics Office was vertical and external horizontal coordination types. Vertical internal coordination is carried out by superiors and subordinates within the scope of the Office of Communication and Information. Horizontal external coordination is carried out between agencies by the Office of Communication and Information with the Office of Culture and Office of Tourism. The mechanism for achieving effective coordination is at the hierarchical level, rules of procedure and the creation of independent tasks. Coordination mechanisms that are running poorly are found in vertical information systems and horizontal relationships, namely direct contact. Obstacles experienced in coordination are the lack of employee discipline in carrying out tasks, lack of direct employee contact between agencies and the absence of a special team*

**Keywords: coordination, Jogja Istimewa Application**

## PENDAHULUAN

Menkominfo mengatakan pemerintah akan membangun akses Internet sampai ke desa. Pemerintah juga membuka kesempatan kepada pengembang untuk menyediakan aplikasi digital yang bisa membantu perkembangan potensi desa misalnya di bidang pertanian atau kelautan. Ini merupakan sinyal bagus dari pemerintah. Apabila terwujud, langkah ini bisa "membangunkan" Indonesia, sehingga benar-benar bisa menjadi "raksasa" teknologi digital Asia atau bahkan dunia. (Dikutip dari kominfo.go.id diakses pada 12 Maret 2017)

Langkah ini pun layaknya dapat diterapkan oleh Pemerintah sebagai penunjang layanan kepada masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti ini dapat dimanfaatkan pula sebagai strategi pemasaran pariwisata suatu Pemerintah Daerah. Salah satu pemerintah daerah yang telah memanfaatkan hal ini adalah pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan meluncurkan program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa.

Pariwisata merupakan sektor utama bagi DIY. Banyaknya objek, dan daya tarik wisata di DIY telah menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Pada 2017 tercatat kunjungan wisatawan sebanyak 5.229.298 orang, dengan rincian 397.951 dari mancanegara, dan 4.831.347 orang dari nusantara. Bentuk wisata di DIY meliputi wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus, dan berbagai fasilitas wisata lainnya, seperti resort, hotel, dan

restoran. (Sumber, Buku Statistik Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017)

Oleh sebab itu diperlukan banyak inovasi guna mendongkrak jumlah wisatawan yang berkunjung di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Kota Jogja, Pemerintah DIY melakukan sejumlah cara. Satu hal yang perlu dicoba sebagai terobosan pemasaran pariwisata Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan memanfaatkan arus globalisasi yang sedang mengalir deras. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bisa lebih dekat dengan masyarakat dengan menggunakan internet. Serta dengan potensipotensi tersebutlah Pemerintah Daerah Istimewa meluncurkan program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa.

Tidak hanya meliputi sektor pariwisata, program aplikasi Jogja Istimewa ini juga mencakup informasi-informasi umum seperti budaya, pendidikan, kesehatan, perindustrian, dan lain-lain. Layanan lain yang ada dalam aplikasi Jogja Istimewa ini adalah petunjuk mengenai tempat-tempat wisata, hotel, kuliner, dan beberapa tempat strategis lain yang dapat dikunjungi saat berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menunjukkan pula informasi tentang transportasi dan gambaran lalu lintas terkini. Dengan cakupan yang luas tersebut diperlukan kerjasama dari banyak pihak, salah satunya dari instansi-instansi yang membawahi bidang masing-masing. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa perlu adanya koordinasi dari beberapa Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD).

Istilah koordinasi berasal dari bahasa Inggris *coordination*. Kata *coordinate* terbentuk dari dua kata yaitu *co* dan *ordinate* yang mempunyai arti mengatur. Dengan demikian dalam istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling terkait. Dengan kata lain koordinasi hanya dapat dicapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi. Karena itu dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien).

Menurut Awaluddin Djamin dalam Malayu Hasibuan (2008:86) koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

Penelitian ini dilakukan di Di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas-dinas dipilih sebagai lokasi penelitian karena Dinas-dinas tersebut merepukan pengelola dan contributor dalam aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa Aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa diluncurkan oleh Pemerintah DIY. Aplikasi tersebut membantu wisatawan yang buta akan kota Jogja sehingga lebih mudah mencari destinasi wisata tujuan.

Aplikasi ini dapat diunduh pada *play store*

dengan ukuran 24MB.. Ada dua pilihan bahasa yaitu bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Aplikasi ini menggunakan sistem GPS untuk menunjukkan tempat-tempat wisata atau layanan publik yang ada di sekitar kita. Ini sangat membantu sekali tentunya ketika kita ingin mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada didekat kita. Setelah itu ketika masuk ke menu kita akan disugahi beragam menu-menu dengan ikon yang khas Jogja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi di Dinas Komunikasi dan Informatika berjenis koordinasi internal vertikal dan eksternal horisontal. Koordinasi internal vertikal dilakukan oleh atasan dan bawahan pada lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika. Koordinasi eksternal horisontal dilakukan antar instansi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Mekanisme pencapaian koordinasi yang efektif terdapat pada tingkat hierarki, aturan prosedur dan penciptaan tugas-tugas yang berdiri sendiri. Mekanisme koordinasi yang berjalan kurang baik terdapat pada sistem informasi vertikal dan hubungan horisontal yaitu kontak langsung. Hambatan yang dialami dalam koordinasi adalah kurangnya kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas, kurangnya kontak langsung pegawai antar instansi dan tidak adanya tim khusus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem koordinasi antar SKPD dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa. Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaku koordinasi dalam melakukan koordinasi tersebut, serta untuk mengetahui cara-cara untuk mengatasi hambatan

yang ada dalam berkoordinasi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. menyebutkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Moleong, 2014: 6).

### **Setting Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2017 sampai dengan Agustus 2017. Lokasi penelitian berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan, staff bidang Layanan Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, staff bidang umum Dinas Pariwisata, staff bidang umum Dinas Kebudayaan.

### **Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data**

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis dari Milles dan Hubberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Koordinasi Antar SKPD dalam Implementasi Prograam Aplikasi Berbasis *Smartphone* Jogja Istimewa**

#### **Pendekatan Teknik-teknik Manajemen Dasar**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa, kewenangan dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphine* Jogja Istimewa merupakan tanggung jawab dari kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Akan tetapi pengelolaan aplikasi dari mulai pengembanagn sampai pengunggahan konten diserahkan pada Bidang Layanan Teknologi Informasi. Maka kepala Bidang Layanan Teknologi Informasi menjadi pejabat pelaksana kegiatan dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa.

Dalam pelaksanaan kinerjanya, kepala bidang dibantu oleh kepala seksi-seksi yang kewenangannya diberikan langsung oleh Kepala Bidang dan kinerjanya akan dipertanggung jawabkan kepada Kepala Bidang. Setiap seksi tersebut akan menunjukkan satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk suatu kegiatan organisasi, dan mengarah pada tingkat spesialisasi. Jadi dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphine* Jogja Istimewa yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika peran pemimpin organisasi menjadi sentral dalam berkoordinasi. Dengan adanya kejelasan rantai perintah dalam koordinasi yang diberikan pimpinan organisasi kepada bawahan, koordinasi di Dinas Komunikasi dan Informatika akan berjalan dengan baik.

Kejelasan rantai perintah dalam Dinas Komunikasi dan Informatika dapat berjalan dengan baik karena didukung dengan adanya struktu organisasi yang membantu kejelasan garis kewenangan yang diberikan pimpinan.

Namun dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa tidak hanya melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika saja, melainkan ada dinas lain yang terkait. Dalam hal ini, walaupun tidak ada struktur organisasi yang menggambarkan bagaimana koordinasi dan rantai perintah berjalan, koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh atasan mereka melalui surat permintaan yang nantinya akan dijalankan oleh bawahan. Jadi, dalam koordinasi antar instansi ini, peran pemimpin sangat dibutuhkan sebagai jembatan koordinasi antar instansi untuk mewujudkan tujuan koordinasi.

### **Aturan Prosedur**

Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, koordinasi dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa tidak ada aturan prosedur yang mengatur secara khusus bagaimana koordinasi dilakukan, baik antar pegawai, maupun antar instansi. Untuk berjalannya koordinasi dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa, Dinas Komunikasi dan Informatika hanya mengacu pada SOP (*Standard Operating Procedur*) dan SKP (Sasaran Kerja Pegawai). SOP adalah setiap kegiatan rutin yang menuntut para pegawai untuk melakukan aktifitas pekerjaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan SKP adalah sasaran kerja

pegawai untuk pencapaian tugas dan target kerja pegawai dalam satu tahun. Koordinasi yang melibatkan dinas lain juga tidak ada aturan prosedur yang secara khusus yang mengatur koordinasi. Sejauh ini hanya tugas pokok dan fungsi saja yang dijadikan sebagai acuan dan landasan untuk berkoordinasi. Peneliti menilai koordinasi yang dilakukan dalam internal Dinas Komunikasi dan Informatika telah berjalan dengan baik karena sesuai dengan SOP dan SKP yang berlaku. Dalam koordinasi antar instansi pun peneliti sudah menilai dengan baik namun ketidak jelasan aturan prosedur yang baku dan hanya

mengacu pada tugas pokok dan fungsi saja akan mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya mekanisme koordinasi dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa.

### **Penerapan Tujuan dan Rencana**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan pelaksanaan implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa yang melibatkan beberapa dinas maka diperlukan pengkoordinasian yang baik untuk menerapkan tujuan dan rencana program.

Koordinasi penerapan tujuan dan rencana pelaksanaan implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa dilakukan pada tahap awal rencana pembuatan perencanaan. Dinas lain yang terkait dengan implementasi program tersebut akan memberikan masukan untuk menyelaraskan dengan tujuan dari kegiatan dinas lain agar tidak terjadi tumpang tindih.

Jadi untuk proses penerapan tujuan dan rencana dalam pelaksanaan implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja

Istimewa, peneliti menilai sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dikuatkan dengan penerapan tujuan dan rencana implementasi program tersebut melibatkan berbagai dinas lain yang terlibat sehingga akan meminimalisir masalah-masalah dalam berkoordinasi seperti perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu, perbedaan dalam orientasi waktu, perbedaan dalam orientasi antar pribadi, dan perbedaan formalitas struktur.

### **Pendekatan Meningkatkan Koordinasi Potensial**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sistem informasi vertikal dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa. Sistem informasi vertikal dimulai dari contributor yang mencari data konten untuk kemudian mengolahnya menjadi konten utuh sebelum diunggah oleh administrator aplikasi dengan persetujuan kepala bidang. Koordinasi dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa bersifat saling ketergantungan yang berirutan diantara satuan-satuan organisasi. Dimana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Keterlambatan distribusi data yang melewati tingkatan-tingkatan tertentu akan berpengaruh pada tingkat efektifitas koordinasi, baik koordinasi yang dilakukan secara internal maupun koordinasi eksternal.

Dalam menangani keterlambatan pendistribusian data, Dinas Komunikasi dan Informatika memberlakukan adanya SKP (saasran kerja pegawai) bagi pegawai untuk pencapaian tugas dan target kerja pegawai.

Namun pada kenyataannya SKP belum bias menjadi landasan untuk pencapaian target karena masih ditemukan adanya keterlambatan dalam pendistribusian data. Oleh sebab itu diperlukan kesadaran dari pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan kinerjanya dan diperlukan pemberlakuan aturan sanksi bagi pegawai yang tidak disiplin dalam ketepatan waktu pendistribusian data.

### **Kontak Langsung**

Berdasarkan pengamatan peneliti dalam penelitian, kontak langsung dilakukan oleh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan koordinasi pada implementasi program aplikasi berbasis *Smartphone* Jogja Istimewa. Kontak langsung terjadi antar pegawai disaat pegawai saling tukar informasi secara langsung. Hal ini dapat terjadi karena para pegawai merupakan kelompok kerja yang sama dalam lingkup infprkerja, sehingga dapat melakukan kontak langsung antar pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika. Kontak langsung juga dilakukan dengan instansi lain yang terlibat dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa. Kontak langsung ini terjadi saat ada rapat koordinasi antar satuan kerja dinas. Selebihnya, komunikasi antar instansi terjalin secara tidak langsung melalui surat. Komunikasi yang dilakukan dengan surat-menyurat biasanya hanya menghasilkan komunikasi satu arah tanpa timbal balik langsung antara pengirim dan penerima. Hal tersebut akan mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap kebijakan.

### **Peran Penghubung**

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam implementasi program

aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa belum terdapat peranan penghubung antar departemen untuk menyalurkan informasi atau untuk berkomunikasi. Peranan penghubung dapat berupa tim khusus yang terdiri dari masing-masing pegawai dari setiap instansi yang terlibat dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa. Sebagai peranan penghubung antar instansi, mereka bertugas untuk menyampaikan informasi serta sebagai individu penyampai pesan atas permasalahan-permasalahan yang dialami.

Jadi, penilaian peneliti terhadap peranan penghubung antar instansi terkait implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa masih kurang baik. Hal ini karena belum adanya tim khusus sebagai penghubung antar instansi. Dinas Komunikasi dan Informatika menjelaskan pembentukan tim khusus masih dalam tahap wacana karena masih berfokus pada pengembangan aplikasi terlebih dahulu.

### **Organisasi Matrik**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa, peneliti tidak menemukan adanya organisasi matrik pada pelaksanaannya. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya manajer khusus yang menangani program aplikasi ini. Tim khusus sebagai sarana mempermudah koordinasi juga belum terbentuk. Selain itu, ketiadaan organisasi matrik juga dapat dilihat dari struktur organisasi yang terpisah antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan dinas-dinas lain yang terkait.

Tidak adanya manajer proyek dalam

implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* ini juga bisa diakibatkan oleh pelaksana yang masih merasa belum diperlukannya koordinasi dan prestasi teknis yang tinggi serta ketrampilan dan keahlian khusus dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa.

### **Pendekatan Mengurangi Kebutuhan akan Koordinasi**

#### **Penciptaan Sumberdaya Tambahan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa tidak ditemukan penciptaan sumberdaya-sumberdaya tambahan untuk memberikan kelonggaran bagi satuan-satuan kerja dan mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Hal ini dikarenakan karena Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan pengunggahan konten di *website* dinas, hanya saja penggunaan aplikasi berbasis *smartphone* ini adalah medium yang berbeda. Tidak adanya penciptaan sumberdaya sumberdaya tambahan tersebut bisa dikarenakan karena Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata tidak membutuhkan tersebut sebab implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa bukan masalah yang terlalu kompleks dan koordinasi diantara Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, kebutuhan akan koordinasi dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa yang tidak terlalu besar membuat penciptaan sumberdaya sumberdaya tambahan tidak diperlukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika maupun

dinas-dinas lain.

### **Penciptaan Tugas Sendiri**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa ada instansi yang mempunyai tugas sendiri tanpa berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Tugas yang berdiri sendiri dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa yaitu Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata bisa melakukan penyusunan agenda kegiatan program, artikel-artikel mengenai dinas terkait dan liputan kegiatan dinas lapangan. Hal-hal tersebut dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika karena hal-hak tersebut sudah tercantum dalam tugas pokok dan fungsi dinas.

Jadi, penciptaan tugas-tugas yang berdiri sendiri dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa telah berjalan dengan baik. Adanya tugas yang berdiri sendiri ini dimaksudkan untuk mengurangi kebutuhan akan koordinasi yang terjadi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kebudayaan serta Dinas Pariwisata. Penciptaan tugas yang berdiri sendiri dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap instansi sehingga akan memunculkan tanggung jawab yang lebih dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa pada setiap instansi, dan keputusan dalam penindakan akan dapat terselesaikan dengan cepat.

### **SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, dalam implementasi program aplikasi berbasis

*smartphone* Jogja Istimewa tidak ditemukan penciptaan sumberdaya-sumberdaya tambahan untuk memberikan kelonggaran bagi satuan-satuan kerja dan mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Hal ini dikarenakan karena Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan pengunggahan konten di *website* dinas, hanya saja penggunaan aplikasi berbasis *smartphone* ini adalah medium yang berbeda. Tidak adanya penciptaan sumberdaya-sumberdaya tambahan tersebut bisa dikarenakan karena Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata tidak membutuhkan tersebut sebab implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa bukan masalah yang terlalu kompleks dan koordinasi diantara Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, kebutuhan akan koordinasi dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa yang tidak terlalu besar membuat penciptaan sumberdaya-sumberdaya baru tidak diperlukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, maupun Dinas-dinas terkait lainnya.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam implementasi program aplikasi berbasis *Smartphone* Jogja Istimewa ada instansi yang mempunyai tugas sendiri tanpa berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Tugas yang berdiri sendiri tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata bisa melakukan penyusunan agenda melakukan penyusunan agenda kegiatan program, artikel-artikel mengenai dinas terkait dan liputan kegiatan dinas di lapangan. Hal-hal tersebut dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa harus berkoordinasi dengan dinas Komunikasi dan Informatika, karena tugas tersebut sudah tercantum dalam tugas pokok fungsi masing-masing dinas.

Jadi penciptaan tugas-tugas yang berdiri

sendiri dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa telah berjalan dengan baik. Adanya tugas yang berdiri sendiri ini dimaksudkan untuk mengurangi kebutuhan akan koordinasi yang terjadi antara Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan. Penciptaan tugas yang berdiri sendiri dilakukan sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing instansi sehingga memunculkan tanggung jawab yang lebih besar, serta keputusan dalam penindakan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa dilakukan dengan cara koordinasi internal vertikal dan eksternal horizontal.

Koordinasi internal vertikal terjadi pada masing-masing dinas. Sementara koordinasi eksternal horizontal terjadi pada saat Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan.

Dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa terdapat penciptaan tugas yang berdiri sendiri. Penciptaan tugas tersebut tergantung pada tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan koordinasi.

Hambatan dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa yaitu instansi terkait belum memiliki pola koordinasi yang baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan pegawai dalam menyelesaikan tugas, kurangnya kontak langsung antar instansi, serta tidak adanya tim khusus yang terdiri dari pegawai-pegawai antar instansi untuk secara khusus melakukan koordinasi. Dalam pelaksanaan koordinasi memang sudah sesuai dengan pendekatan-pendekatan koordinasi yang efektif, namun masih ada beberapa mekanisme yang belum berjalan dengan baik.

Mekanisme tersebut adalah sistem informasi vertikal, kontak langsung dan peranan penghubung.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu dibentuk tim khusus sebagai peranan penghubung. Tim peranan penghubung ini berisikan pegawai-pegawai dari dinas-dinas yang terlibat dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa. Harapannya, tim khusus ini dapat membuat koordinasi lebih mudah dan dapat mengakomodasi lebih banyak kontribusi dari tiap dinas yang terlibat dalam implementasi program aplikasi berbasis *smartphone* Jogja Istimewa.
2. Perlu diterapkan penjadwalan rapat koordinasi yang dijadwalkan secara berkala guna membahas monitoring dan evaluasi implementasi program. Hal ini juga bisa digunakan sebagai upaya peningkatan komunikasi dua arah antar instansi yang selama ini belum terjalin.
3. Perlu adanya penghargaan sebagai motivasi bagi pegawai untuk disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Tiarman. (2011) *Implementasi Fungsi Koordinasi dalam Pemerintahan (Studi Kasus Koordinasi Gubernur DIY dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- Akmal. (1995) *Ketahanan Wilayah Sumatera Barat*. Hasil Penelitian Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia. PPS PKN UI: Jakarta
- Bagong Syanto, Sutinah, (2011) *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Coralie Bryant dan louise G.White. (1987) *Manajemen pembangunan untuk negara berkembang*. Jakarta: LP3ES
- Handoko, T. Hani. (2003) *Managemen Adisi 2*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P. (2008) *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara
- Inu kencana, Djameludin Tandjung, Supardan Modeong. (1999) *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Lexy J. Moleong, (2007) *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Masari Singarimbun, Sofian Effendi, (1989) *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES
- Marshall E. Dimock, dkk. 1996. *Administrasi Negara*. Jakarta: Erlangga
- Moekijat. (1994) *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teori)*. Bandung: Mandar Maju
- Nasution, S. (2003) *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Seri Kusuma, Martisa. (2016) *Strategi Pemerintah Surakarta dalam Mengembangkan E-Government (Studi Kasus pada Aplikasi Smartphone Solo Destination)* Tesis Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada
- Siagian, Sondang P. (1982) *Peranan Staf Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Sugiyono. (2006) *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syafruddin, Ateng. 1993. *Pengaturan Koordinasi di Pemerintahan Daerah*. Bandung: Cipta
- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-digitalteknologiasia/0/sorotan>

